

Dari Hashtag ke Jalanan: Aktivisme Digital dan Transformasi Gerakan Sosial di Indonesia, Hong Kong, dan Korea Selatan

Teddy Chrisprimanata Putra¹, Frichicilia Grace Stahlumb², Ivandra Solihin³

¹Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

^{2,3}Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: teddycputra@upnvj.ac.id¹, frichiciliagrace@upnvj.ac.id², ivandrasolihin@upnvj.ac.id³

Article History:

Received: 30 Oktober 2025

Revised: 17 November 2025

Accepted: 26 November 2025

Keywords: *Aktivisme Digital, Sosial Media, Gerakan Sosial, Indonesia, Hongkong, Korea Selatan*

Abstract: *Platform digital telah memberi bentuk baru pada gerakan aktivisme dan kemudian berimplikasi langsung terhadap gerakan sosial di sebuah negara. Meski telah menjadi satu bidang yang cukup intens diteliti, nyatanya pengaruh aktivisme digital terhadap gerakan sosial di rezim kekuasaan yang berbeda masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial, aktivisme sosial media, dan represi digital sebagai pisau bedah utama. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, studi ini akan mengkaji secara mendalam perihal pengaruh aktivisme sosial media terhadap sebuah gerakan sosial, termasuk di dalamnya faktor-faktor penguat dan pembatas pengaruh aktivisme di sosial media. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme digital memiliki peran penting dalam membentuk konstelasi gerakan sosial kontemporer, baik di Asia Tenggara maupun di Asia Timur. Namun pengaruhnya sangatlah ditentukan oleh konteks politik dalam negeri dan karakter rezim di masing-masing negara, sehingga pengaruh aktivisme digital terhadap gerakan sosial tidak dapat dipahami secara seragam—ia bekerja melalui interaksi kompleks antara affordance teknologi digital; struktur jaringan formal dan informal; peluang politik yang dihadirkan oleh dinamika rezim.*

PENDAHULUAN

Perkembangan di era digital yang pesat dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi sebuah arena kontestasi politik yang strategis dan krusial dalam dinamika masyarakat kontemporer (Jost et al. 2018; Uwalaka and Nwala 2023). Kemajuan teknologi digital saat ini, tidak hanya merubah cara individu ataupun kelompok dalam berkomunikasi, tetapi juga mulai menggeser pola mobilisasi dan ekspresi kolektif masyarakat sipil (Abramova & Antonova 2024; Lynn et al. 2022). Aktivisme digital menjadi praktik advokasi politik yang dimediasi oleh platform daring dan berperan mempercepat proses difusi informasi, menurunkan biaya koordinasi aksi, memperluas basis partisipasi, dan memfasilitasi

pembentukan solidaritas lintas batas geografis serta sosial (Balan and Dumitrica 2024; Cheng, Lui, and Fu 2023). Melalui karakteristiknya yang desentralistik dan interaktif, media sosial memberi ruang bagi kemunculan pelbagai bentuk partisipasi politik baru yang hadir untuk menantang mekanisme mobilisasi konvensional. Namun demikian, efektivitas aktivisme digital tidak serta merta bersifat universal. Aktivisme digital sangat dipengaruhi oleh pelbagai hal, seperti: struktur politik, kapasitas kelembagaan, serta konfigurasi rezim yang membingkai ruang digital (Li, Bernard, & Luczak-Roesch 2021; Saka & Ojo 2024; Sudirman et al. 2024). Artinya, pengaruh media sosial terhadap eskalasi gerakan sosial tidak hanya dipahami sebagai fenomena teknologi, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara ruang digital, peluang politik, dan relasi kekuasaan.

Pengaruh aktivisme digital terhadap eskalasi gerakan sosial secara konsisten menunjukkan bahwa struktur jaringan dan posisi aktor dalam jaringan memiliki peran dalam menurunkan biaya koordinasi dan turut mempercepat difusi informasi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Gonzalez-Bailon, dkk (2011) menemukan bahwa proses rekrutmen untuk sebuah gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan kontagion kompleks dalam jaringan X dan aktor yang duduk di posisi sentral serta pola keterhubungan tertentu nyatanya lebih efektif dalam menjangkau partisipan dalam pola penyebaran aksi luring (González-Bailón et al. 2011). Temuan ini menunjukkan bahwa gerakan digital saja nyatanya tidak cukup untuk memaksimalkan difusi gerakan sosial, tetapi perlu juga memperhatikan aspek-aspek lainnya, seperti: struktur jaringan, titik sentralitas, hingga jalur difusi agar dapat memahami mekanisme yang menghubungkan lonjakan daring dengan eskalasi lapangan.

Di sisi lain Bennett dan Segerberg (2013) menyoroti *affordance platform* dan sifat *connective action* sebagai faktor determinan dalam mobilisasi di era kontemporer. Mereka mengemukakan bahwa aksi yang terhubung secara digital kerap kali berbentuk *personalised content* namun tersambung melalui tanda digital bersama, sehingga mobilisasi dapat meluas dengan cepat tanpa perlu melalui organisasi formal yang kuat (Bennett & Segerberg 2013). Tufekci (2017) memperkuat argumentasi tersebut dengan menyebut bahwa meski platform digital hari ini mampu memudahkan penyebaran sekaligus memperbesar kapasitas mobilisasi, gerakan yang muncul seringkali sangat rentan apabila tidak diimbangi dengan keberadaan infrastruktur organisasi dan jalur institusional untuk menerjemahkan tekanan menjadi perubahan substansial (Tufekci, 2017).

Meski platform digital memberi kemudahan para aktor untuk melipatgandakan gerakan, tetapi ruang digital menyimpan ancaman berupa represi digital yang menegaskan batasan kemampuan ruang digital dalam menghasilkan perubahan secara substansial. Dalam studinya, King, Pan, dan Roberts (2013) memperlihatkan bagaimana sensor yang ditargetkan dapat memungkinkan kritik terhadap otoritas kekuasaan tetap muncul tetapi di waktu bersamaan juga membungkam ekspresi kolektif yang mendukung aksi. Studi lainnya yang mengangkat tentang *digital repression* dan *governance platform* (King et al. 2013) menunjukkan bahwa tindakan seperti pemblokiran, *throttling*, hingga kriminalisasi admin akun media sosial memberi dampak untuk memoderasi gerakan sosial.

Fenomena-fenomena tersebut secara empiris ditampilkan dalam tiga gerakan sosial besar yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan Timur, yakni di Indonesia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Di Indonesia, Gerakan 17+8 yang berlangsung pada akhir bulan Agustus hingga awal September 2025 menunjukkan bagaimana peran media sosial sebagai pengungkit utama dalam memobilisasi massa lintas wilayah secara cepat. Pelbagai tagar di media sosial, seperti #17Plus8, #WargaJagaWarga, dan #PolisiPembunuhRakyat menjadi medium koordinasi aksi, distribusi informasi, serta menjadi sarana artikulasi tuntutan publik yang beragam ke dalam kerangka

naratif yang lebih terpusat (Altahmazi 2020; Shahid 2025). Di Hong Kong, *Umbrella Movement* (2014) menunjukkan bagaimana kanal-kanal digital, seperti Facebook, WhatsApp, dan LIHKG menjadi sarana infrastruktur taktis dalam upaya memobilisasi suara pro-demokrasi yang berlangsung di bawah rezim represif dan berisiko tinggi (Agur and Frisch 2019). Sedangkan di Korea Selatan, *Impeachment of Yoon Seok Yeol* (2024) menunjukkan media sosial memiliki peran signifikan sebagai katalis framing moral untuk menyalurkan kemarahan publik terhadap kekuasaan dan mampu bertransformasi menjadi tekanan politik yang terinstitusionalisasi melalui mekanisme parlemen (Sinta Rahmadani and Imam Yuadi 2025; YUN 2019).

Ketiga kasus tersebut menggambarkan variasi bentuk dan keluaran aktivisme digital. Di satu sisi, media sosial dapat berfungsi sebagai instrumen percepatan mobilisasi massa dan penyebaran wacana (*accelerator of contention*), sebagaimana terlihat pada konteks Indonesia. Sedangkan di sisi lain media sosial dapat menjadi instrumen koordinasi taktis di tengah kondisi represi negara, seperti di Hong Kong, serta dapat menjadi jembatan antara tekanan publik dan kanal institusional formal dalam demokrasi, seperti yang terlihat di Korea Selatan. Berangkat dari hal tersebut, tingkat keterbukaan politik, pola respons negara, serta derajat pelembagaan partisipasi publik menjadi faktor sejauh mana pengaruh aktivisme media sosial terhadap gerakan sosial (Bennett and Segerberg 2013). Dalam konteks tertentu, media sosial dapat menjadi *power multiplier* yang di satu sisi dapat memperkuat kapasitas gerakan, tetapi di sisi lain juga dapat menghambat aktivisme digital menjadi perubahan politik yang substansial (King et al. 2013).

Tiga negara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini—Indonesia, Hong Kong, dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan yang kontras pada konfigurasi rezim dan ekologi digital. Indonesia sebagai negara demokrasi elektoral menampilkan ruang publik yang relatif terbuka dengan dinamika masyarakat sipil yang tinggi. Media sosial mengambil peran penting dalam pembentukan opini publik dan mengkoordinir aksi massa. Di Hong Kong berada di bawah sistem politik semi-otoriter dengan tingkat pengawasan digital yang relatif kuat oleh pemerintah pusat Tiongkok, menjadikan aktivisme digital di sana sebagai bentuk perlawanan terhadap represi negara. Sementara di Korea Selatan menampilkan model demokrasi konstitusional yang lebih mapan tinimbang Indonesia. Kanal digital berfungsi sebagai medium pengawasan warga dan alat artikulasi moral yang dapat berinteraksi langsung dengan lembaga-lembaga formal negara. Perbedaan corak ini membuka ruang bagi analisis komparatif mengenai bagaimana konteks politik memediasi pengaruh aktivisme digital terhadap eskalasi gerakan sosial di masing-masing negara.

Studi tentang aktivisme digital dan korelasinya dengan gerakan sosial sejauh ini cenderung berfokus pada dimensi mobilisasi dan juga komunikasi politik—relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana perbedaan struktur politik dan peluang institusional mempengaruhi efektivitas aktivisme digital. Sebagian besar studi juga sering kali berpusat pada konteks Barat dan jarang mengangkat studi kasus di Asia yang memiliki dinamika yang unik antara demokratisasi, represi, dan teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut—mengetahui lebih mendalam bagaimana media sosial mampu memberi pengaruh terhadap eskalasi gerakan sosial dalam corak politik yang berbeda, serta menjelaskan faktor-faktor yang memperkuat sekaligus membatasi pengaruh tersebut di Indonesia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Kehadiran artikel ini diharapkan mampu memberi kontribusi secara akademik maupun praktis. Secara akademik, artikel ini diharapkan mampu memperkuat pendekatan komparasi lintas rezim dalam studi gerakan sosial yang selama ini masih didominasi oleh penelitian di negara-negara Barat. Sedangkan secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi sebuah panduan dalam merancang strategi digital yang lebih efektif guna memperluas dampak gerakan yang dibangun.

LANDASAN TEORI

Gerakan Sosial

Tradisi kajian gerakan sosial telah menyediakan pondasi konseptual yang penting dalam rangka memahami dinamika mobilisasi secara kolektif, termasuk juga dalam konteks digital. Pendekatan *political opportunity structure* yang dikembangkan oleh McAdam (1982) dan Tarrow (2011) menekankan bahwa aksi kolektif sangat dipengaruhi oleh peluang struktural, seperti keterbukaan sistem politik, fragmentasi elit, hingga dukungan institusional yang dapat menciptakan ruang yang lebih leluasa bagi mobilisasi (McAdam, 1982; Tarrow, 2011). *Resource Mobilization Theory* (RMT) memperluas argumen ini dengan menyoroti pentingnya ketersediaan sumber daya organisasi, jaringan, hingga kapasitas komunikasi sebagai salah satu faktor determinan dalam keberhasilan gerakan sosial (McCarthy & Zald, 1977). Sementara, perspektif pembingkaihan (*framing perspective*) menambahkan dimensi kognitif, menekankan peran aktor gerakan dalam membangun makna kolektif melalui tiga proses utama, yakni *diagnostic framing*, *prognostic framing*, dan *motivational framing* (Benford & Snow, 2017). Melalui ketiga pendekatan ini, gerakan kolektif dapat membentuk kerangka konseptual untuk menganalisis interaksi antara peluang politik, sumber daya, dan produksi makna dalam eskalasi gerakan sosial.

Teori ini juga memberi landasan penting bagi penelitian kontemporer yang berupaya untuk memahami gerakan sosial di ruang-ruang digital. Dalam konteks era media sosial, banyak elemen dari teori klasik tetap relevan, tetapi secara perlahan mengalami transformasi bentuk. Misalnya, konsep peluang politik kini mencakup *digital opportunity structures* (Theocharis, 2015), yakni sejauh mana ruang digital terbuka terhadap ekspresi politik publik. Selanjutnya, sumber daya gerakan kini tidak lagi hanya berbentuk organisasi dan dana, tetapi juga berbentuk *digital capital*—jejaring, algoritma, dan perhatian publik (Poell & Van Dijck, 2014). Termasuk juga proses framing yang kini dapat terdistribusi secara cepat melalui pelbagai macam bentuk, seperti tagar, meme, hingga narasi visual yang bersifat partisipatif (Papacharissi, 2014). Dengan demikian, teori gerakan sosial menjadi sebuah pondasi analitis yang penting dalam upaya memahami bentuk-bentuk baru mobilisasi yang dimediasi melalui teknologi digital.

Aktivisme Sosial Media

Aktivisme sosial media telah memainkan peran penting dalam membentuk gerakan politik di era digital yang mana aktivis dapat menggalang dukungan, mengorganisir protes, dan menantang kekuasaan negara melalui *platform* yang tersedia seperti TikTok, Twitter, Facebook, dan Instagram (Jena, 2025). Selain itu, aktivisme sosial media merupakan instrumen yang penting dalam spektrum aktivitas sosial, terutama untuk memicu kesadaran dan dukungan awal serta dapat menjadi pintu masuk bagi partisipasi yang lebih dalam dan berkelanjutan dalam gerakan sosial (Cooper, 2023). Perkembangan lingkungan digital yang semakin masif memungkinkan masyarakat dari pelbagai golongan dan usia untuk membangun koneksi global serta menjadi bagian dari gerakan global yang mengarah pada aksi kolektif berskala besar hingga menciptakan mobilisasi global (Sainz & Hanna, 2023). Sehingga, dapat dikatakan aktivisme media sosial adalah fenomena yang terus berkembang hingga saat ini karena memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk masa depan gerakan politik di era digital (Jena, 2025).

Aktivisme sosial media bila direfleksikan dalam konteks fenomena yang terjadi di negara-negara benua Asia merupakan sebuah paradigma dalam proses revolusioner yang mana penggunaan jaringan media sosial memainkan peran krusial dalam konteks sosial, agama, dan politik (De & Thakur, 2016). Penetrasi internet yang aktif memungkinkan generasi muda di Asia menggunakan media sosial sebagai senjata melawan ketidakadilan, penindasan, hingga sarana

menumbuhkan rasa pluralisme. Hal ini juga berlaku bagi kelompok oposisi, terpinggirkan, dan tertindas yang menyuarakan pendapat mereka pada isu-isu tertentu yang membentuk media sosial sebagai medium demokratis. Aktivitas ini juga tidak terlepas dari tantangan besar yaitu mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial di lingkungan digital yang cepat berubah (Jalli, 2025). Oleh sebab itu, aktivisme media sosial tidak hanya sekedar memperkuat partisipasi demokratis tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih terinformasi dan aktif yang mampu mendorong perubahan positif (Sato, 2024).

Represi Digital

Pengaruh media sosial terhadap gerakan sosial sangat bergantung pada konteks politik dan konfigurasi kekuasaan yang mengatur ruang digital. Pelbagai studi yang berbicara mengenai represi digital menunjukkan bahwa negara dapat menggunakan teknologi atau masuk ke ruang yang sama untuk mengendalikan, memantau, dan menekan ekspresi politik digital melalui pelbagai mekanisme, seperti sensor, pemblokiran, hingga kriminalisasi (Feldstein 2021; King et al. 2013; MacKinnon 2012). Lebih jauh lagi disebutkan bahwa *platform governance* dan *algorithmic mediation* menjadi faktor pemengaruh bagi arah mobilisasi. Poell, Nieborg, & van Dijck (2019) menyebutkan bahwa logika algoritmik platform, seperti X, TikTok, dan Facebook dapat menentukan visibilitas isu politik dan membentuk dinamika atensi publik. Dengan demikian, ruang digital tidak lagi menjadi arena yang netral, ruang digital kini menjadi ruang pertarungan pelbagai kepentingan, seperti sosial, ekonomi, dan politik (González-Bailón et al. 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Harrison (2009) mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak dan perilaku yang diamati. Metode ini memberi ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang ‘mendalam’ bukan ‘meluas’ (Harrison 2009). Artinya, sifat yang dimiliki oleh penelitian kualitatif memiliki kesesuaian dengan penelitian ini yang membutuhkan eksplorasi dari banyak fenomena guna memperoleh interpretasi yang tajam.

Selanjutnya, peneliti menggunakan studi kepustakaan (*literature review*) sebagai metode utama untuk menggali pemahaman pengaruh aktivisme sosial media terhadap gerakan sosial sebagai salah satu kanal ekspresi politik warga negara di tiga negara, yakni Indonesia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap pelbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan pelbagai berita berbasis luring maupun daring yang relevan. Hasil dari analisis ini nantinya akan digunakan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam perihal pengaruh aktivisme sosial media terhadap sebuah gerakan sosial, termasuk di dalamnya faktor-faktor penguat dan pembatas pengaruh aktivisme di sosial media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan 17+8 di Indonesia

Isu naiknya tunjangan yang akan diterima oleh Anggota DPR-RI dan berserakannya pernyataan-pernyataan pejabat publik yang tidak memperhatikan kesulitan hidup warga berhasil memicu protes terbuka dari warga negara Indonesia. Kemarahan publik tersebut mencapai eskalasi puncak ketika tewasnya pengemudi ojek berbasis daring bernama Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob Polri di daerah Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025. Demonstrasi besar-besaran ini pun belakangan dengan nama Gerakan 17+8. Dalam waktu yang

relatif singkat, peristiwa tersebut berhasil memicu gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai gagal dalam menunjukkan akuntabilitas kinerjanya. Pemilihan istilah 17+8 tersebut merujuk pada jumlah tuntutan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Awalnya, gerakan ini bukanlah sebuah gerakan yang dipimpin oleh organisasi formal (*leaderless*), melainkan gerakan ini muncul dari lintas jaringan, seperti: komunitas digital, mahasiswa, jurnalis independen, dan kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya aktif dalam menyuarakan isu kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Struktur gerakan yang cenderung cair dan desentralistik menjadi ciri khas utama, sekaligus menjadi penanda bahwa pola protes politik di Indonesia telah bergeser, dari mengandalkan jaringan formal yang begitu terpusat ke arah jaringan informal (*networked mobilization*) yang memungkinkan gerakan diinisiasi oleh banyak individu atau kelompok.

Di dalam ruang digital, Gerakan 17+8 berkembang melalui strategi komunikasi yang begitu bergantung pada *affordance platform* media sosial. Tanda gerakan dalam bentuk tagar, seperti #17Plus8, #WargaJagaWarga, #PolisiPembunuhRakyat, dan #BubarkanDPR menjadi kanal utama bagi difusi informasi dan koordinasi aksi lintas daerah. Platform sosial media, seperti X, Instagram, hingga TikTok berfungsi sebagai ruang yang digunakan untuk berbagi video kekerasan aparat, infografis data korban kekerasan oleh aparat, serta narasi solidaritas warga sipil. Sedangkan aplikasi percakapan, seperti Telegram dan Discord digunakan sebagai ruang koordinasi tertutup untuk menghindari pelacakan dari aparat. Fenomena ini menunjukkan ciri logika *connective action* sebagaimana dikemukakan oleh Bennett dan Segerberg (2013), yang menyebut individu dengan narasi personal yang beragam tetap terhubung melalui simbol digital bersama. Mobilisasi di ruang digital tidak lagi bergantung pada jaringan formal, melainkan pada keterhubungan horizontal antar aktor yang memanfaatkan *affordance* teknologi untuk membangun solidaritas simbolik dan emosional (Bennett & Segerberg, 2013).



Gambar 1. Poster 17+8 dalam Aksi Demonstrasi Akhir Agustus s.d Awal September 2025

Sumber: Akun Instagram @jrmk.jakarta dan @_dear.renny

Penggunaan media sosial terasa begitu signifikan pengaruhnya terhadap Gerakan 17+8 di Indonesia karena mampu mempercepat sekaligus meningkatkan eskalasi gerakan. Dalam kurun kurang dari sepuluh hari sejak awal mula gerakan di 25 Agustus 2025 mampu meningkatkan

jumlah tagar #17Plus8 meningkat secara eksponensial hingga menembus ratusan ribu interaksi lintas *platform*. Pola ini mencerminkan *complex contagion* (González-Bailón, Borge-Holthoefer, Rivero, & Moreno, 2011)—partisipasi dalam aksi diperkuat oleh paparan berulang dari jejaring sosial yang sama. Artinya, semakin banyak individu di jaringan menggunakan simbol protes, semakin besar kemungkinan individu lain bergabung. Eskalasi gerakan ini menunjukkan sebuah pergeseran penting, yakni dari ekspresi opini daring menuju mobilisasi massa di dunia nyata, ditandai dengan aksi serentak di 12 kota besar di awal September 2025. *Platform* media sosial nyatanya tidak hanya menjadi ruang artikulasi wacana, tetapi juga mampu menjadi infrastruktur mobilisasi yang menghubungkan ruang digital dan ruang fisik melalui mekanisme koordinasi waktu nyata (*real-time coordination*).

Di samping mempercepat dan meningkatkan eskalasi gerakan, penggunaan sosial media dalam Gerakan 17+8 mampu memperkuat solidaritas antar warga negara. Pada momen-momen aksi demonstrasi dilakukan oleh pelbagai kalangan di depan Gedung DPR/MPR RI, banyak selebritis/influencer yang turut hadir dan membagikan makanan serta minuman kepada seluruh peserta demonstrasi secara cuma-cuma. Mulai dari Atta Halilintar, Faby Marcelia, Bang Madun, Deni Sumargo, Bobon Santoso, hingga Tretan Muslim. Selain membagikan makanan dan minuman secara gratis kepada peserta demonstrasi, dukungan selebritis/influencer pun datang dalam bentuk lain, yakni menjadi petugas medis seperti yang dilakukan oleh Zaskia Adya Mecca. Fenomena ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap isu maupun situasi terkini tidak hanya dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah saja, bahkan kalangan selebritis/influencer dengan kehidupan yang mapan pun turut merasakan keresahan terhadap situasi ini.

Namun, peningkatan mobilisasi ini direspon negara dengan tindakan koersif yang signifikan oleh aparat. Sejak awal September 2025, otoritas keamanan melakukan pembubaran massa aksi dengan kekerasan—mulai dari penangkapan jurnalis warga, kekerasan fisik, pemblokiran fitur siaran langsung di beberapa *platform* digital, hingga pemblokiran akses internet di beberapa titik demonstrasi. Pelbagai laporan dari lembaga hak asasi manusia mencatat setidaknya puluhan korban mengalami luka-luka akibat menerima kekerasan, serta munculnya represi digital terhadap akun-akun aktivis yang dianggap sebagai “penghasut” atau “provokator”. Respons represif ini menunjukkan upaya negara untuk mengendalikan narasi sekaligus mendominasi di ruang digital dan ruang fisik secara bersamaan. Hal ini kemudian mencerminkan sebuah fenomena represi digital sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Feldstein (2021). Dalam konteks ini, media sosial menjadi ruang pertarungan ganda, mempertemukan ekspresi politik warga negara dan kemampuan negara untuk memonopoli narasi melalui represi dan disinformasi (Feldstein, 2021).

Gerakan 17+8 menunjukkan paradoks aktivisme digital di negara demokrasi elektoral—di satu sisi, ruang daring memperluas sekaligus memperkuat partisipasi politik dan solidaritas warga negara, tetapi di sisi lain, absennya jaringan formal dalam sebuah gerakan sosial justru mempersulit upaya konsolidasi pelbagai tuntutan ke dalam saluran institusional yang berkelanjutan. Fenomena ini kemudian mempertegas tesis yang dikemukakan Tufekci (2017) mengenai karakter gerakan digital yang kuat tetapi rapuh (*strong but fragile*)—kuat dalam kemampuan memobilisasi massa dalam waktu yang singkat, tetapi cenderung rapuh dalam hal daya tahan dan kapasitas politik jangka panjang (Tufekci, 2017). Meski demikian, gerakan 17+8 berhasil membuka kembali ruang diskursus publik tentang reformasi aparat keamanan, kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas negara di era demokrasi digital. Berangkat dari hal tersebut, Gerakan 17+8 di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sebuah arena artikulasi politik warga negara dalam menghadapi praktik kekuasaan yang kian tidak transparan.

Hong Kong: *Yellow Umbrella Movement* (Gerakan Payung Kuning)

Sejak diserahkannya Hong Kong dari pemerintah Inggris ke China pada 1997, proses demokratisasi di wilayah ini mengalami pasang surut. Statusnya sebagai wilayah administrasi khusus, membuat Hong Kong memiliki metode spesifik untuk memilih kepala pemerintahannya yang dipilih oleh komite pemilihan khusus untuk kemudian diangkat oleh pemerintah pusat di Beijing. Pada tahun 2007, Beijing menjanjikan pemilihan umum langsung bagi Hong Kong yang rencananya akan mulai diimplementasikan di 2017 (Cheng, 2014).

Harapan untuk dapat memilih pemimpin sendiri bagi warga Hong Kong menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya terjadi pada 31 Agustus 2014 saat Beijing berusaha menghalangi proses ini dengan mengatur secara penuh pemilu untuk kepala pemerintah Hong Kong (Chu, 2018). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat peraturan wajib *screening* (penyaringan) kandidat beberapa bulan sebelum pemilu yang tentunya berlawanan dengan asas keterbukaan (Ortmann, 2015). Keputusan tersebut memicu protes besar dari rakyat yang menjurus kepada konflik terbuka. Demonstrasi terbesar sepanjang sejarah wilayah tersebut pun terjadi dan disebut sebagai *The Yellow Umbrella Movement* (Gerakan Payung Kuning) dikarenakan banyak demonstran yang menggunakan payung kuning untuk melindungi dirinya dari gas air mata yang ditembakkan oleh polisi (Rauhala, 2014).



Gambar 2. Seorang Demonstran Menggunakan Payung Untuk Melindungi Dirinya

Sumber: [Bloomberg.com](https://www.bloomberg.com) dan ft.com

Demonstrasi ini merupakan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan lebih dari 1,2 juta orang turun ke jalan dalam rentang antara 28 September sampai 15 Desember 2014 (Tin-bor Hui, 2017). Demonstran pro-demokrasi ini bahkan turun ke jalan selama 10 minggu sehingga membuat banyak aktivitas lumpuh. Titik protes warga berlokasi di dua tempat

penting yaitu, Admiralty (pusat pemerintahan Hong Kong) dan di Mong Kok (daerah residensial yang mayoritas berisi kelas menengah). Peristiwa ini diawali dari gerakan siswa dan mahasiswa, saat itu semakin meluas ke kelompok masyarakat lainnya setelah dipicu oleh gas air mata yang ditembakkan polisi ke demonstran.

Gerakan ini disebut sebagai “*Youthquake*” di mana anak-anak muda yang terdiri dari siswa sekolah menengah atas dan mahasiswa diharapkan dapat “mengguncangkan” pemerintah pusat di Beijing. Tidak seperti di China daratan, Hong Kong tidak memiliki peraturan pembatasan internet/sosial media, sehingga membuat seluruh warga dapat mengakses sosial media tanpa terkecuali (Agur & Frisch, 2019). Salah satu yang membedakan gerakan ini dari gerakan-gerakan sebelumnya di Hong Kong adalah peran penting internet—terutama sosial media dalam proses penyebaran informasi dan ajakan terlibat dalam protes tersebut.

1. Metode Penyebarluasan Informasi Gerakan

Media internasional dan pelbagai literatur akademik yang menyorot peran penting sosial media dalam gerakan ini. Beberapa contoh *platform* yang digunakan oleh warga Hong Kong, yaitu: Facebook yang lebih banyak digunakan untuk komunikasi terbuka dan semi-terbuka; dan WhatsApp untuk sarana komunikasi ke kelompok yang lebih kecil sekaligus tempat warga membagikan berita-berita terkini (Agur & Frisch, 2019).

“Saya menerima banyak informasi mengenai demo ini melalui WhatsApp bahwa militer ikut terlibat dan bahkan polisi dipersenjatai dengan senjata laras panjang, peluru karet, bahkan peluru asli” Lydia Sung, Jurnalis Mahasiswa di Hong Kong” (Tay, 2014).

Usaha-usaha mobilisasi yang dilakukan berupa penyebaran konten yang diunggah melalui *platform* media sosial, seperti Facebook maupun WhatsApp oleh teman maupun keluarga. Dari seluruh konten, poster-poster kreatif yang dibuat oleh generasi muda merupakan yang paling menggerakkan masyarakat (Wright, 2019).



Gambar 3. Konten Sosial Media Dalam Gerakan Payung Kuning

Sumber: CNN.com dan South China Morning Post

2. Konvergensi Antara Gerakan Sipil Demokratis dan Budaya Populer.

Salah satu strategi yang cukup menarik adalah penggunaan narasi yang membuat demonstran seakan menjadi *superhero*/pahlawan dengan menghubungkan gerakan

tersebut ke tokoh-tokoh *Hollywood*, seperti: Batman, Hulk, Star Wars, dan Thor. Selain itu, aktor terkenal seperti Bruce Lee juga dijadikan meme dan poster untuk menciptakan citra baik serta dan positif di tengah masyarakat (Patsiaouras, 2021). Mayoritas dari karakter-karakter tersebut selalu ditampilkan dengan nuansa kuning begitu juga dengan payung sebagai fitur utama dari gerakan ini. Niatan tersebut selanjutnya diharapkan dapat menciptakan rasa empati dan solidaritas dari warga yang dibagikan melalui Facebook maupun WhatsApp Group.



Gambar 4. Konten Sosial Media dengan Narasi *Superhero*

Sumber: cnn.com dan Patsiaouras, 2021

3. Peran Media Internasional

Berbeda dengan masyarakat lokal, jurnalis internasional menggunakan *platform* twitter untuk menaikkan atensi dunia (Agur & Frisch, 2019). Bahkan Twitter memainkan peran besar di mana elit-elit lokal berusaha untuk membuat media luar tetap mendapatkan informasi sekaligus membuat narasi agar dunia mendukung aksi yang dilakukan oleh para aktivis di Hong Kong. Ini adalah salah satu keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat Hong Kong, karena akses sosial media terbuka luas tanpa ada pembatasan seperti di China daratan.

Aktivisme Digital (*Digital Activism*) merupakan suatu metode baru untuk menggerakkan warga dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama berkaitan dengan usaha untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak demokratis. Di Hong Kong sendiri, terutama dalam Gerakan Payung Kuning 2014, aktivis lokal secara spontan dan berkolaborasi menggunakan gambar visual yang menarik untuk mendapatkan simpati masyarakat maupun media internasional. Dan secara bertahap dapat membentuk identitas kolektif di antara organisasi pro-demokrasi, menumbuhkan partisipasi publik, dan menarik perhatian dunia, tidak hanya melalui sosial media tetapi juga media-media mainstream (Patsiaouras, 2021).

Gerakan Perlawanan Darurat Militer 2024 di Korea Selatan

Pada 3 Desember 2024, Pukul 23.00 waktu setempat, Presiden Korea Selatan Yoon Seok Yeol mengumumkan pidato yang mengejutkan warga Korea Selatan melalui pengumuman diberlakukannya darurat militer dengan dalih melindungi negara dari kekuatan “anti-negara” yang bersimpati pada Korea Utara (Ewe et al., 2024). Keputusan darurat militer di Korea Selatan

malam itu diumumkan ketika Presiden Yoon sedang berjuang menghadapi kebuntuan dalam legislasi rancangan undang-undang anggaran negara serta upaya penyelidikan terhadap anggota kabinetnya (Ewe et al., 2024). Kekhawatiran masyarakat Korea Selatan terhadap pengumuman darurat militer bukanlah tanpa alasan. Pada 1980-an, rezim otoriter Korea Selatan di bawah kepemimpinan Chun Doo Hwan juga pernah menetapkan status darurat militer di tengah ketegangan mereka dengan Korea Utara sekaligus menjadi kali pertama Korea Selatan menetapkan status darurat militer (CNN Indonesia, 2024).

Status darurat militer di Korea Selatan kala itu digunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan publik serta membuat warga tunduk terhadap keputusan pemerintah, serta pemerintah melakukan kontrol yang ketat terhadap penulisan dan penerbitan media (Ku, 2024). Akibat pengekangan tersebut, warga Korea Selatan pun pada masa itu melakukan pemberontakan di Kota Gwangju dengan tujuan untuk mengubah Korea Selatan menjadi negara yang lebih demokratis. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan *Gwangju Uprising* ini pun diperingati sebagai peristiwa bersejarah yang menciptakan kenangan “gelap” bagi warga Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena peristiwa tersebut tercatat menewaskan ratusan jiwa dan warga Korea Selatan khawatir peristiwa serupa kembali di masa kini.

Sesaat setelah Yoon Seok Yeol mengumumkan keadaan darurat militer, *platform* media sosial menjadi “senjata” utama untuk menyebarkanluaskan informasi. Lee Jae Myung, pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, yang kini terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, menyiarkan secara langsung video dirinya memanjat tembok Gedung Majelis Nasional untuk ikut serta dalam pemungutan suara yang bertujuan mencabut keadaan darurat militer melalui *platform* YouTube. Dalam siaran tersebut, Lee menyerukan kepada warga Korea Selatan: “*Silakan datang ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ada kemungkinan sangat tinggi bahwa militer akan dikerahkan untuk menangkap anggota parlemen*”. Video siaran langsung Lee Jae Myung seketika menjadi viral dan ditonton lebih dari 2,4 juta kali. Video tersebut secara cepat tersebar melalui media sosial, sehingga memungkinkan masyarakat untuk merespons dengan cepat, sehingga mencegah militer mengambil alih kendali parlemen. Keberadaan gawai dan aksi beberapa warga untuk ikut menyiarkan kondisi terkini di lokasi kejadian memperlihatkan bagaimana pasukan militer menghalangi akses anggota parlemen ke Gedung Majelis Nasional (Ewe et al., 2024).

Video siaran langsung yang dibuat Lee Jae Myung memberikan efek terhadap konstelasi politik Korea Selatan hanya kurang dari enam jam. Presiden Yoon Seok Yeol dipaksa untuk mencabut darurat militer, setelah mayoritas anggota parlemen sepakat untuk membatalkan pemberlakuan darurat militer tersebut. Bagi warga Korea Selatan, rentang waktu enam jam tersebut digambarkan hanya berisi kekacauan, demonstrasi, ketakutan, dan ketidakpastian di dalam negeri. Peristiwa ini lantas membawa Presiden Yoon jatuh dari kekuasaan tertinggi Korea Selatan. Bahkan pengumuman dan pembatalan situasi darurat militer di hari yang sama mendapat cemoohan dari media nasional sebagai “*six-hour dream*” (Chae & Kim, 2025).

Fenomena politik di Korea Selatan telah menunjukkan peran strategis dari *platform* digital, terutama media sosial dan siaran langsung dalam mempercepat mobilisasi warga untuk berkumpul dan memberi respons terhadap situasi krisis yang sedang terjadi. Selama keadaan darurat diberlakukan, peran media sosial tampak lebih menonjol. Hal ini dikarenakan hanya media sosial saja yang memiliki fitur yang dapat menyebarluaskan informasi secara mudah, cepat, dan biaya mobilisasi rendah—termasuk juga memberi ruang penyampaian informasi yang berbeda dari informasi yang disebarkan oleh pemerintah atau media mainstream. Lee (2025) menjelaskan bahwa warga Korea Selatan telah menemukan bentuk baru demokrasi melalui Gerakan Perlawanan Darurat Militer 2024 yang dibagi dalam empat poin utama, yakni:

1. Diversifikasi dan Perluasan Generasi yang Berpartisipasi dalam Gerakan Sipil Demokratis

Pergeseran demografi dalam partisipasi demokratis ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi generasi muda dalam aksi demonstrasi yang sebelumnya kurang terlihat. Tidak hanya generasi tua yang telah berpartisipasi dalam pelbagai aksi demonstrasi sebelumnya, tetapi kini generasi muda dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun turut memberi pengaruh signifikan terhadap pembentukan dunia dengan cara mereka sendiri. Kekuatan sipil di balik demokrasi Korea Selatan terus berkembang menjadi bentuk yang lebih luas, inklusif, dan menyuguhkan metode partisipasi yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya.



Gambar 5. Mahasiswa dan Orang Tua Turut Menjadi Peserta Demonstrasi Menentang Status Darurat Militer serta Pemakzulan Presiden Yoon Seok Yul

Sumber: Lee (2024); Smith & Kim (2024)

2. Konvergensi Antara Gerakan Sipil Demokratis dan Budaya Populer

Demokrasi sebagai nilai sosial bersama kini mulai berinteraksi dengan budaya populer lewat pelbagai cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana demonstrasi yang bertujuan untuk memakzulkan Presiden Yoon Seok Yeol sangat mirip dengan konser Korean Pop (K-Pop)—sebuah warna baru dalam demokrasi di Korea Selatan. Lagu protes konvensional yang digantikan oleh lagu K-Pop terkini dilantunkan bersama dengan penyalaan lilin dan *lightstick* menjadi sebuah budaya protes baru yang melibatkan masyarakat dari semua generasi tanpa terkecuali. Menjadikan lagu-lagu terkini, seperti: APT Rosé, Whiplash Aespa, Ring Ding Dong SHINee, Apartment Yoon Soo-il, Amor Fati Kim Yeon-ja, dan To You Infinite sebagai alunan pemersatu massa aksi yang berjumlah lebih dari satu juta orang untuk turut menyuarakan pemakzulan Presiden Yoon Seok Yeol di depan Gedung Majelis Nasional di Yeouido, Seoul telah menjadi fakta sekaligus pergeseran gaya protes terbuka di Korea Selatan.



Gambar 6. Penggunaan Lightstick K-Pop sebagai Simbol Perlawanan Massa Aksi di Korea Selatan

Sumber: Shon & Choi (2024); The Straits Times (2024)

3. Pendapat Demokratis Diungkapkan dengan Cara yang Lebih Terbuka dan Luas

Generasi Milenial dan Z di Korea Selatan membawa metode budaya protes baru yang kreatif dan humoris selama aksi demonstrasi pemakzulan Presiden Yoon Seok Yeol. Mereka menggunakan spanduk meme berisi humor satire yang bertujuan mengkritik Presiden Yoon Seok Yeol dan elite politik. Melalui satire yang segar dan berasal dari kehidupan sehari-hari, metode ini telah menggantikan metode-metode tradisional. Misalnya, gambar satire Presiden Yoon Seok Yeol yang dilengkapi dengan takarir mengejek keputusannya saat mabuk dan meme yang menggambarkan kerja sama antara mantan Presiden Moon Jae-in dengan Yoon Suk-yeol. Pendekatan ini memungkinkan ekspresi pendapat yang lebih bebas, kreatif, dan partisipatif, mencerminkan perubahan dalam cara masyarakat menyampaikan aspirasi politiknya.



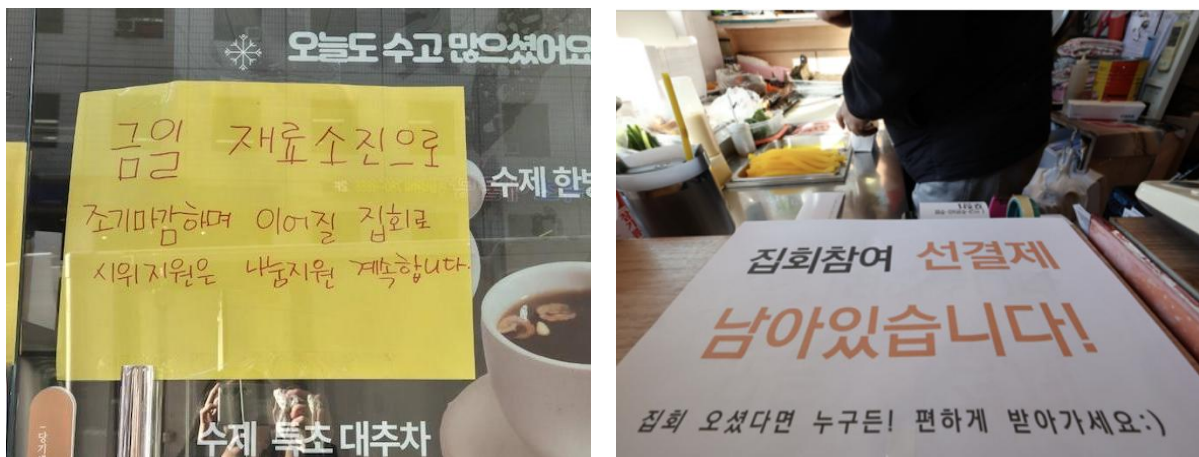
Gambar 7. Pelbagai Macam Meme dan Kalimat Satire sebagai Bentuk Protes Warga Korea Selatan Terhadap Presiden Yoon Seok Yeol

Sumber: Moon (2024)

4. Diversifikasi Metode Partisipasi dalam Gerakan Sipil Demokratis

Salah satu metode partisipasi yang menonjol selama demonstrasi adalah gerakan

pay-it-forward relay—sebuah gerakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua kalangan untuk mendukung para demonstran dalam bentuk pemberian makanan, minuman, ataupun kebutuhan lain secara gratis yang dapat mendukung jalannya aksi demonstrasi dan hal ini disebarluaskan melalui media sosial agar peserta demonstrasi lainnya dapat mengetahui kabar tersebut. Selain masyarakat umum, para selebritis juga turut serta dalam mendukung aksi solidaritas ini, seperti penyanyi Lee Seung Hwan yang mengadakan konser gratis kepada peserta demonstrasi dengan lirik lagu yang sengaja diubah agar sesuai dengan konteks tuntutan demonstrasi, yakni pemakzulan Presiden Yoon Seok Yeol. Termasuk grup K-Pop NewJeans yang mereservasi sebuah restoran *gimnap* agar seluruh makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut dapat dinikmati secara gratis oleh para demonstran (Yim, 2024). Gerakan “*pay-it-forward relay*” merupakan salah satu bukti bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya hadir dalam bentuk menjadi peserta demonstrasi, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk solidaritas memenuhi kebutuhan para demonstran di lapangan. Dalam konteks ini, peran sosial media sangat membantu dalam menyebarkan gerakan ini dalam menyebarkan informasi kepada para demonstran yang berada di luar jangkauan, sehingga gerakan ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir demonstrasi.



Gambar 8. Salah Satu Coffee Shop dan Kafe di Sekitar Gedung Majelis Nasional Korea Selatan Menyediakan Makanan dan Minuman Gratis Bagi Para Demonstran

Sumber: Lee (2024); Yim (2024)

Pengaruh Aktivisme Digital di Tengah Corak Rezim yang Beragam

Penggunaan sosial media yang ditunjukkan di setiap negara telah menunjukkan konfigurasi *platform* dan praktik yang berbeda. Hal ini dikarenakan preferensi pengguna serta tekanan dari pembuat kebijakan yang berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, mobilisasi lebih cenderung bersifat hibrida, misalnya aplikasi percakapan Telegram, Discord, dan WhatsApp digunakan sebagai kanal untuk melakukan koordinasi tertutup—seperti: koordinasi teknis lapangan saat aksi demonstrasi dan merumuskan tuntutan sekaligus narasi aksi. Sedangkan *platform* X, Instagram, TikTok, dan YouTube digunakan sebagai kanal terbuka untuk melakukan pembingkai narasi (*framing*), siaran langsung kondisi terkini di lokasi aksi, dan rekrutmen massa aksi. Metode ini memudahkan penyebaran informasi dan ajakan secara cepat, tetapi tetap bergantung pada jaringan formal, seperti kampus, serikat buruh, hingga NGO. Di Hong Kong, para aktor gerakan bergeser ke *platform* yang menyediakan anonimitas dan memiliki fitur koordinasi *real-time*,

seperti Telegram dan LIHKG. Hal ini dilakukan karena tingginya risiko pengawasan yang dihadapi oleh para peserta demonstrasi. Sementara kanal terbuka, seperti: Twitter (sekarang X) dan YouTube digunakan untuk menyebarluaskan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dan membangun dukungan internasional. Sedangkan di Korea Selatan, ekosistem *platform* relatif lebih terinstitusionalisasi, seperti KakaoTalk dan portal berita berbasis daring memiliki peran penting dalam upaya membangun koordinasi dan pembentukan opini. Sementara kanal terbuka seperti X dan YouTube digunakan secara sinergis untuk menyebarluaskan sekaligus memperkuat narasi moral dan tekanan politik.

Hadirnya aktivisme digital di tengah gerakan sosial memberi pengaruh yang berbeda-beda terhadap eskalasi gerakan di masing-masing negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari karakter *platform* sosial media dan pola penggunaan yang disesuaikan dengan masing-masing konteks. Di Indonesia, *affordance plural platform* mempercepat *mobilization by resonance*—tanda bersama digital, seperti tagar dan konten visual mampu secara signifikan mentransformasi keresahan publik dan insiden tewasnya warga sipil menjadi gelombang perlawanan yang menyebar cepat ke banyak wilayah. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya jumlah peserta dan sebaran geografis dalam waktu relatif singkat, namun cenderung tanpa melalui kanal institusional yang jelas untuk menyalurkan tuntutan maupun aspirasi bersama. Di Hongkong, *medium choice* (penggunaan kanal tertutup dan terbuka secara sinergis) berhasil memperbesar jumlah peserta aksi, sekaligus meningkatkan resiliensi aksi di lapangan—meskipun peserta demonstrasi harus dihadapkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan melalui gas air mata. Sedangkan di Korea Selatan, *platform* digital berhasil menguatkan pembingkai narasi (*framing*) dan menjadi *amplifier* publik—dalam waktu yang bersamaan, publik mampu memviralkan bukti-bukti skandal yang dilakukan oleh Presiden Yoon Seok Yeol dan membangun tekanan politik yang besar. Dua hal tersebut membantu menstimulus proses institusionalisasi tuntutan, sehingga eskalasi gerakan, baik melalui ruang digital dan ruang nyata mampu diterjemahkan menjadi *outcome* politik yang terinstitusionalisasi.

Namun keberhasilan dalam meningkatkan dan memperbesar eskalasi gerakan perlawanan juga mendatangkan konsekuensi bagi para peserta demonstrasi di setiap negara. Kekerasan atau represi yang diterima oleh para demonstran spektrumnya berbeda-beda karena bergantung pada kapasitas represif negara dan jalur institusional yang tersedia. Di Indonesia, respons koersif terhadap para demonstran hadir dalam bentuk pembubaran paksa, penangkapan aktivis secara massal, kriminalisasi tokoh utama gerakan yang dianggap sebagai “provokator”, pelbagai bentuk kekerasan di ruang digital, hingga yang paling ekstrem adalah penghilangan nyawa. Respons aparat tersebut lantas memberi konsekuensi munculnya efek *backfire*—kemarahan publik semakin besar, solidaritas semakin menguat, dan eskalasi gerakan semakin tidak terbendung. Di Hongkong, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari China, para peserta demonstrasi menghadapi represi yang lebih intensif. Mulai dari aksi aparat keamanan yang keras di lapangan, penangkapan dan penuntutan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap “provokator” aksi, pelabelan aksi demonstrasi sebagai sebuah pelanggaran keamanan nasional, hingga tekanan di ruang-ruang digital. Respons tersebut mengakibatkan mobilisasi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, biaya partisipasi semakin meningkat, hingga penyempitan ruang penyaluran tuntutan ke lembaga formal. Sedangkan di Korea Selatan, respons koersif cenderung dilakukan di ranah legal administratif yang terinstitusionalisasi. Hal ini kemudian mengakibatkan seringnya dilakukan proses penegakkan hukum kepada individu.

Berangkat dari uraian tersebut, aktivisme digital memberi pengaruh ganda terhadap gerakan sosial yang kemudian termoderasi oleh rezim yang berjalan di masing-masing negara. Hadirnya aktivisme digital dalam konteks gerakan sosial hari ini memberi kemudahan yang tidak diberikan

oleh era sebelumnya, tetapi di waktu yang bersamaan, aktivisme digital juga memiliki keterbatasannya. Kehadiran aktivisme digital mampu memudahkan sekaligus menekan biaya koordinasi massa aksi secara signifikan; mampu membangun *affective publics* secara efektif; menjadi ruang yang menyediakan *frame* isu yang dapat memayungi beragamnya aktor gerakan; hingga berpotensi menghasilkan momentum yang besar dan cepat, serta dapat disaksikan langsung oleh dunia. Di sisi lain, aktivisme digital juga menghadirkan pelbagai keterbatasan, seperti: rezim represif mampu memberi tekanan terhadap gerakan ini melalui kekerasan digital (sensor, *throttling*, kriminalisasi akun) hingga tekanan hukum, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, pola *connective action* sering kali rapuh bila diterjemahkan ke jalur jaringan formal. Dengan kata lain, bahwa benar sosial media sangat berpotensi memperbesar kapasitas dan eskalasi aksi demonstrasi, tetapi tidak secara otomatis akan menjamin terjadinya sebuah perubahan kondisi sosial politik. Keberhasilan sebuah gerakan sosial sangat bergantung pada kombinasi penggunaan *platform*, konfigurasi jaringan, hingga ketersediaan kanal dan peluang institusional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme digital memiliki peran penting dalam membentuk konstelasi gerakan sosial kontemporer, baik di Asia Tenggara maupun di Asia Timur. Namun pengaruhnya sangatlah ditentukan oleh konteks politik dalam negeri dan karakter rezim di masing-masing negara. Di Indonesia, media sosial digunakan sebagai akselerator mobilisasi spontan dengan menggunakan logika *connective action* yang mampu mentransformasikan kemarahan publik menjadi bentuk solidaritas warga. Meski demikian, gerakan yang terbangun masih cenderung rapuh karena ketiadaan jaringan formal yang mapan dan solid dalam memimpin gerakan. Di Hong Kong, media sosial menjadi sebuah infrastruktur perlawanan yang efektif meski berada di bawah rezim yang begitu represif. Kehadiran media sosial memungkinkan dilakukannya koordinasi taktis lapangan, namun di waktu yang bersamaan juga meningkatkan risiko kriminalisasi dan kekerasan di ruang digital. Sedangkan di Korea Selatan, ekosistem digital cenderung lebih terbuka dan memberi ruang bagi terintergasinya mobilisasi publik dan kanal-kanal institusional. Hal ini kemudian mampu mengkonversi tekanan publik berbasis daring menjadi perubahan politik formal. Artinya, pengaruh aktivisme digital terhadap gerakan sosial tidak dapat dipahami secara seragam—ia bekerja melalui interaksi kompleks antara *affordance* teknologi digital; struktur jaringan formal dan informal; peluang politik yang dihadirkan oleh dinamika rezim. Dan dalam konteks ini, ruang digital tidak hanya berhenti sebagai arena komunikasi, tetapi juga hadir sebagai sebuah arena kontestasi politik yang sangat menentukan bagaimana tuntutan maupun aspirasi warga negara dinegosiasikan, dimediasi, dan dimaknai dalam lanskap demokrasi dan otoritarianisme di Asia.

DAFTAR REFERENSI

- Abramova, S., & Antonova, N. (2024). Functions of civil society performed in digital participation of young people. *Discourse-P*.
https://doi.org/10.17506/18179568_2024_21_1_15
- Agur, C., & Frisch, N. (2019). Digital Disobedience and the Limits of Persuasion: Social Media Activism in Hong Kong's 2014 Umbrella Movement. *Social Media and Society*, 5(1).
<https://doi.org/10.1177/2056305119827002>
- Altahmazi, T. H. (2020). Collective pragmatic acting in networked spaces: The case of #activism in Arabic and English Twitter discourse. *Lingua*, 239, 102837.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lingua.2020.102837>
- Aspinall, E., & Weiss, M. L. (2012). The Limits of Civil Society: Social Movements and Political Parties in Southeast Asia. Dalam *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics*. Routledge.
- Baek, B. Y. (2025). Is social media new tool for democracy or catalysts of polarization in South Korea? *Koreatimes*. Retrieved from <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/politics/20250101/is-social-media-new-tool-for-democracy-or-catalysts-of-polarization-in-south-korea>
- Balan, V., & Dumitrica, D. (2024). Technologies of last resort: The discursive construction of digital activism in Wired and Time magazine, 2010–2021. *New Media and Society*, 26(9), 5466–5485. <https://doi.org/10.1177/14614448221135886>
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2017). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *New Critical Writings in Political Sociology: Volume Two: Conventional and Contentious Politics*, 26(2000), 109–197. <https://doi.org/10.4324/9781003572923-9>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. In *Cambridge Studies in Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Castells, M. (2012). Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet Age. In ベインクリニク学会治療指針 2. Polity Press.
- Chae, S., & Kim, J. C. (2025). Martial Law and Changing Korean Society: The Rise of the Far-Right and the Emergence of 2030 Women. *Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 23(2). Retrieved from <https://apjif.org/2025/2/chae-kim>
- Cheng, E., Lui, E., & Fu, K.-W. (2023). The power of digital activism for transnational advocacy: Leadership, engagement, and affordance. *New Media & Society*, 26, 6416–6439. <https://doi.org/10.1177/14614448231155376>
- Cheng, J. (2014). Hong Kong democracy and Beijing's promise. Diakses melalui Eastasiaforum.org website: <https://eastasiaforum.org/2014/07/24/hong-kong-democracy-and-beijings-promise/>
- Chu, D. S. (2018). Media Use and Protest Mobilization: A Case Study of Umbrella Movement Within Hong Kong Schools. *Social Media + Society*, 4(1), 205630511876335. <https://doi.org/10.1177/2056305118763350>
- Cooper, K. (2023). The Effectiveness of Online Activism: Who it is Effective For, What Issues it is Effective For, and What Time Period it is Effective For. *Political Sciences*, 42. Diakses melalui https://scholarsarchive.library.albany.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=honorcollege_pos
- De, S., & Thakur, P. B. (2016). Social Media and Social Movement: Contemporary Online Activism in Asia. *Media Watch*, 7(2). <https://doi.org/10.15655/mw/2016/v7i2/98745>
- Ewe, K., Wong, T., Marsh, N., Kwon, J., & Ku, Y. (2024). How two hours of martial law unfolded in South Korea. *BBC News Indonesia*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j0rg6y3nwo>
- Feldstein, S. (2021). *The Rise of Digital Repression: How Technology is Reshaping Power, Politics, and Resistance*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190057497.001.0001>
- Flynn, S. I. (2023). Social Movement Theory: Resource Mobilization Theory. Diakses melalui EBSCO Information Services, Inc website: <https://www.ebsco.com/research->

-
- [starters/social-sciences-and-humanities/social-movement-theory-resource-mobilization](#)
- González-Bailón, S., Borge-Holthoefer, J., Rivero, A., & Moreno, Y. (2011). The dynamics of protest recruitment through an online network. *Scientific Reports*, 1, 1–7. <https://doi.org/10.1038/srep00197>
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Prenada Media Group.
- Headley, T. Y., & Tanigawa-Lau, C. (2016, April 6). Why did Hong Kong's umbrella movement fail? Diakses melalui Thediplomat.com website: https://thediplomat.com/2016/04/why-did-hong-kongs-umbrella-movement-fail/?utm_source=chatgpt.com
- Human Rights Watch. (2015, September 24). Hong kong: Investigate handling of “umbrella movement.” Diakses melalui Human Rights Watch website: <https://www.hrw.org/news/2015/09/24/hong-kong-investigate-handling-umbrella-movement>
- Jalli, N. (2025). Viral Justice: TikTok Activism, Misinformation, and the Fight for Social Change in Southeast Asia. *Social Media + Society*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>
- Jena, N. (2025). Social Media Activism and Its Influence on Political Movements: A Comparative Analysis of Global Protests. *The Journal of International Social Research*, 18(120), 1–3. Diakses melalui <https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/social-media-activism-and-its-influence-on-political-movements-a-comparative-analysis-of-global-protests-1102268.html>
- Jost, J., Barberá, P., Bonneau, R., Langer, M., Metzger, M., Nagler, J., ... Tucker, J. (2018). How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Social Networks. *Political Psychology*, 39, 85–118. <https://doi.org/10.1111/pops.12478>
- Krishna, G. (2023). Social movements in Asia, from silos to strength. Retrieved from Asia Democracy Chronicles website: <https://adnchronicles.org/2023/03/02/social-movements-in-asia-from-silos-to-strength/>
- KING, G., PAN, J., & ROBERTS, M. E. (2013). How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression. *American Political Science Review*, 107(2), 326–343. <https://doi.org/10.1017/S0003055413000014>
- Ku, Y. N. (2025). Opposition spokesperson grabs soldier's gun in front of National Assembly. *BBC News Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c30nl5yq54eo>
- Lee, D. D. (2024). How South Korea woke up to the shortest martial law in history. *Al Jazeera*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/features/2024/12/4/how-south-korea-woke-up-to-the-shortest-martial-law-in-history>
- Lee, J. (2024). College students hold joint rally to urge Yoon's impeachment - The Korea Herald. *The Korea Herald*. Retrieved from <https://www.koreaherald.com/article/10017085>
- Lee, P. S. N., So, C. Y. K., & Leung, L. (2015). Social media and Umbrella Movement: insurgent public sphere in formation. *Chinese Journal of Communication*, 8(4), 356–375. <https://doi.org/10.1080/17544750.2015.1088874>
- Li, Y., Bernard, J. G., & Luczak-Roesch, M. (2021). Beyond Clicktivism: What Makes Digitally Native Activism Effective? An Exploration of the Sleeping Giants Movement. *Social Media and Society*, 7(3). <https://doi.org/10.1177/20563051211035357>
- Lee, Y. J. (2025). *South Korea's Democracy and Martial Law: A New Future Emerging in Crisis*. East Asia Foundation. Retrieved from East Asia Foundation website: https://keaf.org/en/book/EAF_Policy_Debates/South_Koreas_Democracy_and_Martial_Law_A_New_Future_Emerging_in_Crisis?ckattempt=3
-

- Lynn, T., Rosati, P., Conway, E., Curran, D., Fox, G., & O’Gorman, C. (2022). Digital Public Services. In *Digital Towns*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91247-5_3
- MacKinnon, R. (2012). *Consent of the Networked: The Worldwide Struggle For Internet Freedom*. Retrieved from <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:152688558>
- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press.
- McCarthy, J., & Zald, M. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82, 1212–1241. <https://doi.org/10.1086/226464>
- McCurry, J., & Rashid, R. (2024). Motion to impeach South Korean president fails after vote boycott. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2024/dec/07/motion-impeach-south-korean-president-fails-after-vote-boycott-yoon-suk-yeol>
- Moon, J. (2024). Satire on the streets: Koreans turn crisis into festival of resistance - The Korea Herald. *The Korea Herald*. Retrieved from <https://www.koreaherald.com/article/10017138>
- Ortmann, S. (2015). The Umbrella Movement and Hong Kong’s Protracted Democratization Process. *Asian Affairs*, 46(1), 32–50. <https://doi.org/10.1080/03068374.2014.994957>
- Papacharissi, Z. (2014, December 3). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199999736.001.0001>
- Patsiaouras, G., Veneti, A., & Green, W. (2021). The Hong Kong Umbrella Movement as a non-profit organization: An empirical study on the use of visual branding practices for social change. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 27(2). <https://doi.org/10.1002/nvsm.1717>
- Poell, T. ;, & Van Dijck, J. (2014). *UvA-DARE (Digital Academic Repository) Social Media and Journalistic Independence*. Retrieved from <http://www.routledge.com/books/details/9781138023482/>
- Pratama, A. A., & Ramadhan, A. D. Y. A. (2025). Strategi Komunikasi Massa Aksi dalam Mendorong Tuntutan Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol : Analisis Dinamika Sosio – Politik dan Retorika Publik. *Journal of International Relations Diponegoro*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/jirud.v1i1.49184>
- Reuters. (2020, August 30). Exclusive: HK survey shows increasing majority back pro-democracy goals, smaller support for protest movement. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/world/exclusive-hk-survey-shows-increasing-majority-back-pro-democracy-goals-smaller-idUSKBN25Q00X/>
- Saka, L., & Ojo, S. E. (2024). Digital Activism in Transitional Democracies: Insights from the 2018 #EndSARS Campaign in Nigeria. *Comparative Sociology*, 23(1), 1–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15691330-12341563>
- Sainz, G. M., & Hanna, A. (2023). Youth digital activism, social media and human rights education: the Fridays for Future movement. *Human Rights Education Review*, 6(1). <https://doi.org/10.7577/hrer.4958>
- Sato, S. (2024). Social Media and Youth Activism in South Asia: Examining the Role of Digital Platforms in Social Movements in Bangladesh and India. *Authorea*. <https://doi.org/10.22541/au.173016226.67134443/v1>
- Sinta Rahmadani, & Imam Yuadi. (2025). Understanding Political Narratives: Word Cloud Analysis of Yoon Seok-Yeol’s Impeachment. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4), 2687–2695. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1427>
- Sudirman, Rosmilawati, S., Toun, N. R., & Riyanti, N. (2024). Hashtags, Resistance, and Reform: The Global Rise of Digital Activism. *Sinergi International Journal of Communication*

-
- Sciences*, 2(4), 233–244. <https://doi.org/10.61194/ijcs.v2i4.681>
- Shahid, A. (2025). *International Journal of Management Thinking*. 3(1), 1–21.
- Shon, D. H., & Choi, J. S. (2024). Women lead Korean impeachment protests with light stick culture. *CHOSUNBIZ*. Retrieved from <https://biz.chosun.com/en/en-society/2024/12/15/2APCITGVAZCBTHX3LEKYTFBA54/>
- Smith, S. A., & Kim, D. (2024). President Yoon's Impeachment? The View From Seoul. In *Council on Foreign Relations*. Retrieved from <https://www.cfr.org/blog/president-yoons-impeachment-view-seoul>
- Staggenborg, S. (2005). Social Movement Theory. In *Encyclopedia of Social Theory*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412952552.n278>
- The Straits Times. (2024). President Yoon impeached: South Korea's 11 days of turmoil. *The Straits Times*. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/president-yoon-impeached-south-koreas-11-days-of-turmoil>
- Tarrow, S. (2011). Power in Movement Social Movements and Contentuous Politics. In *Cambridge University Press* (Vol. 1). Retrieved from http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpoc.s.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- Tay, H. F. (2014, September 30). Social media is a double-edged sword in Hong Kong protests. *ABC News*. Retrieved from <https://www.abc.net.au/news/2014-09-30/feature-social-media-use-in-hong-kong-protests/5780224>
- Theocharis, Y. (2015). The Conceptualization of Digitally Networked Participation. *Social Media and Society*, 1(2). <https://doi.org/10.1177/2056305115610140>
- Treem, J. W., & Leonardi, P. M. (2012). *Communication Yearbook*, 36 (2012).
- Tse, J. K. H. (2016). The umbrella movement and the political apparatus: Understanding “one country, two systems.” *Theological Reflections on the Hong Kong Umbrella Movement*, 21–66. https://doi.org/10.1057/978-1-349-94846-8_2
- Ting, T.-Y. (2019). Everyday Networked Activism in Hong Kong's Umbrella Movement: Expanding on Contemporary Practice Theory to Understand Activist Digital Media Usages. *International Journal of Communication*, 13, 3250–3269.
- Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. In *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. <https://doi.org/10.5325/bustan.11.1.0077>
- Uwalaka, T., & Nwala, B. (2023). Examining the role of social media and mobile social networking applications in socio-political contestations in Nigeria. *Communication and the Public*, 8, 175–190. <https://doi.org/10.1177/20570473231168474>
- Wright, R. (2019, August 9). “Be water:” Hong Kong protest mantra influences how art is designed and distributed. Retrieved October 21, 2025, from CNN website: <https://edition.cnn.com/style/article/protest-art-hong-kong-intl-hnk>
- Yim, S. H. (2024). Korean celebrities show support to protesters. *Korea Joongang Daily*. Retrieved from <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-12-15/national/politics/Korean-celebrities-show-support-to-protesters/2201015>
- YUN, J.-W. (2019). Democracy in Myth: The Politics of Precariatization in South Korea. *Issues & Studies*, 55(01), 1950001. <https://doi.org/10.1142/S1013251119500012>
-